

## 18 Kecamatan di Lebak Alami Krisis Air Bersih

**LEBAK (IM)**- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Banten mencatat sebanyak 18 kecamatan setempat mengalami krisis air bersih dampak dari kemarau yang terjadi saat ini.

"Kami sejak dua pekan terakhir ini telah mendistribusikan air bersih sebanyak 128.200 liter," kata Kepala BPBD Kabupaten Lebak, Febby Rizki Pratama, di Lebak, Sabtu.

Masyarakat yang dilanda krisis air bersih itu terjadi di 23 desa yang tersebar 18 kecamatan setelah sumur bawah tanah dan sumber mata air mengalami kekeringan.

18 kecamatan itu adalah Warunggunung, Leuwidamar, Panggarangan, Cihara, Wanassalam, Bayah, Cibebber, Muncang, Sajira, Cipanas, Curugbitung, Cimarga, Kalanganyar, Cikulur, Gunungkencana, Banjarsari, Wanassalam, dan Maja.

BPBD Lebak hingga kini terus mengoptimalkan pendistribusian air bersih untuk masyarakat yang dilanda kekeringan dengan menyiapkan tiga unit kendaraan tangki dengan kapasitas 6.000 liter/tangki.

Sedangkan untuk pendistribusian air bersih, pihak BPBD Lebak dibantu oleh pihak kepolisian, PDAM serta sejumlah pengusaha.

"Kami khawatir krisis air bersih itu menimbulkan berbagai penyakit menular yang membahayakan bagi kesehatan," katanya menjelaskan.

Masyarakat di daerah itu kini memanfaatkan air aliran sungai, irigasi dan kolam, yang kondisinya tidak layak untuk keperluan mandi cuci dan kakus (MCK), karena sudah keruh dan berwarna.

"Kami minta warga segera melapor jika mengalami kekeringan untuk mendapat bantuan pasokan air bersih," kata Febby.

Sementara itu, warga Sajira Kabupaten Lebak, Usman mengatakan masyarakat yang menerima pendistribusian air bersih merasa bersyukur karena bisa memenuhi untuk keperluan MCK selama tiga hari ke depan.

"Kami berharap pendistribusian pasokan air bersih dari BPBD setempat bisa dilakukan setiap empat hari sekali," kata pria berusia 40 tahun itu. ● pra



TRADISI SEREN TAUN CISUNGSANG

Masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang membawa padi hasil panen yang akan disimpan dalam leuit saat tradisi Seren Taun di Desa Cisungsang, Lebak, Banten, Minggu (27/8). Tradisi Seren taun merupakan upacara adat tahunan sebagai wujud rasa syukur masyarakat Cisungsang atas hasil panen.

## Ini 4 Upaya Pemkot Tangsel Hadapi Polusi Udara

Empat upaya Pemkot Tangsel dalam mengatasi polusi udara, di antaranya melakukan uji emisi kendaraan berkala, menanam pohon, memberlakukan Work From Home (WFH) bagi pegawai dan memperluas titik car free day (hari bebas kendaraan).

**TANGSEL (IM)**- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel terus memberlakukan kebijakan guna mengatasi persoalan polusi udara yang kian memburuk.

Setidaknya tercatat ada 4 upaya Pemkot Tangsel dalam mengatasi polusi udara, di antaranya melakukan uji emisi kendaraan berkala, menanam pohon, memberlakukan Work From Home (WFH) bagi pegawai dan memperluas titik car

free day (hari bebas kendaraan).

Terkait uji emisi kendaraan secara berkala, pada satu kesempatan Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan kegiatan ini bahkan suda dilakukan jauh sebelum polusi udara merebak di Tangsel.

Melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Tangsel, uji emisi dilakukan denhan cara keliling Kecamatan.

"Layanan ini telah dimulai

pada Kamis kemarin, dilakukan di Kantor Kecamatan Pamulang sebagai lokasi pertama pengujian. Jadi nanti tiap pekan bergantian di masing-masing wilayah kecamatan. Dan hari ini dimulai di Kecamatan Pamulang," ujarnya, kemarin.

Benyamin menambahkan, pada tanggal 31 Agustus akan dilakukan uji emisi keliling di wilayah Kecamatan Setu, lalu 7 September di Kecamatan Ciputat, tanggal 14 September untuk wilayah Kecamatan Ciputat Timur.

"Dan dilanjut, di 21 September pelayanan dilakukan untuk wilayah Kecamatan Serpong, sepekan kemudian tanggal 27 September di Serpong Utara, dan 5 Oktober di Pondok Aren," jelasnya.

Uji emisi keliling ini juga betlaku bagi kendaraan pegawai. Menurutnya selain

melakukan uji emisi kendaraan, sebelumnya pihaknya juga telah melakukan penanaman pohon pelindung, ekstensifikasi ruang terbuka hijau di tiap Kecamatan.

Lebih jauh pihaknya juga memulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi pegawai dilingkungan Pemkot Tangsel. Kebijakan ini berlaku Senin (28/8) ini.

"Iya, mulai Ssenin kita WFH, pegawai ASN dan honororer," ujar Benyamin, Minggu 27 Agustus 2023.

Benyamin mengatakan, pola penerapan WFH akan dilakukan melalui mekanisme 50 persen WFH dan 50 persennya lagi tetap bekerja di kantor.

"Nanti dibagi, pegawai yang WFH dan WFO. Yang WFH itu pejabat administratif, tapi pejabat teknis itu

sebaiknya WFO," ujarnya.

Benyamin menambahkan, pihaknya akan melakukan apa saja dalam upaya mengurangi polusi udara di Tangsel. "Jadi kita lakukan apa aja deh untuk mengatasi persoalan ini," jelasnya.

Terakhir upaya yang dilakukan guna mengatasi polusi udara adalah memberlakukan pembatasan kendaraan di hari libur atau car free day dan pembatasan kendaraan di malam hari atau car free night.

Pemkot Tangsel mendorong perluasan cakupan dan lamanya car free day di wilayah Bintaro dan Serpong, bahkan ia juga akan memberlakukan car free night di tempat-tempat tertentu. Benyamin meyakini sumber polusi udara terbesar karena gas emisi kendaraan. Oleh karena itu diberlakukan car free day dan car free night. ● pp

## Kawasan Perhutani di Lebak Dijadikan Tempat Pertambangan Pasir Ilegal

**SERANG (IM)**- Kawasan Perhutani di Blok Cidahu, Kampung Cidahu, Desa Karang Kamulyan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak dijadikan tempat pertambangan pasir ilegal.

Pertambangan pasir ilegal tersebut kini telah ditindak oleh Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Banten.

Kasubdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Banten, AKBP Candro Sasongko mengatakan, "PT TJM melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki perijinan yang berlaku," ujar mantan Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota tersebut.

Candro menegaskan, perusahaan PT TJM tersebut telah melanggar Pasal 89 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. "Ancaman pidananya lima sampai 15 tahun dan denda Rp 10 miliar," tutur Candro. ● pra

peralatan lain untuk melakukan aktivitas pertambangan pasir ilegal," kata Candro didampingi Kanit Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Banten Kumpul Trisno.

Candro mengatakan, penambangan pasir ilegal tersebut bukan dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat. Penambangan pasir ilegal tersebut dilakukan oleh perusahaan PT TJM.

"PT TJM melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki perijinan yang berlaku," ujar mantan Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota tersebut.

Candro menegaskan, perusahaan PT TJM tersebut telah melanggar Pasal 89 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. "Ancaman pidananya lima sampai 15 tahun dan denda Rp 10 miliar," tutur Candro. ● pra

## Meresahkan Masyarakat, Sindikat Penipuan Online di Jambi Diringkus

**JAMBI (IM)**- Sindikat penipuan online dengan modus mengintai akun media sosial, yang meresahkan masyarakat, berhasil diungkap Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi.

Tidak hanya itu, delapan orang pelaku ikut diringkus petugas di dua tempat berbeda. "Keempat pelaku pertama berada di salah satu ruko di Jalan SK Rd Syahbudin, Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi," ungkap Dirreskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Christian Tory, Minggu (27/8).

Dari hasil pengembangan, petugas menuju lokasi selanjutnya. "Di TKP kedua, yakni di salah satu ruko yang

beralamat di Jalan Jaya Wijaya, Budiman, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, petugas mengamankan 4 orang pelaku lainnya," tuturnya.

Dia menambahkan, penipuan yang dilakukan bermacam-macam, di antaranya dengan menggunakan telepon seluler.

"Modus sindikat ini mencari korbannya melalui akun media sosial, baik itu orang yang mau menjual tanah, bangunan dan sebagainya," tukas Tory.

Dia menambahkan, pihaknya saat ini masih menyelidiki peran dari masing-masing pelaku yang diamankan.

"Mereka ini sindikat penipuan dengan modus baru, yakni berpura-pura menjadi

pelembi. Kemudian, pelaku berpura-pura mentransfer sejumlah uang lalu korban tersebut merasa ditipu," tuturnya.

"Untuk lebih jelasnya nanti akan kita lakukan ekpose terkait peran dan cara sindikat ini melakukan penipuan melalui akun media sosial tersebut," imbuh Tory.

Sementara, Kasubdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi, Kumpul Andi Purwanto menambahkan para pelaku yang diamankan ini masih dilakukan pemeriksaan.

"Berdasarkan keterangan para pelaku, bahwa untuk korbannya sendiri tidak hanya di Provinsi Jambi saja namun ada juga dari luar Provinsi Jambi," tukasnya. ● pra



MAYBANK MARATHON 2023 DI BALI

Peserta disambut penampilan kesenian Bali saat mengikuti Maybank Marathon 2023 di Gianyar, Bali, Minggu (27/8). Ajang lomba Elite Label Road Race satu-satunya di Indonesia tersebut diikuti 13.600 orang pelari dari 50 negara.

## 17 Desa di Trenggalek Masuk Zona Rawan Tsunami

**TRENGGALEK (IM)**- Guna meningkatkan kewaspadaan petugas dan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami dan gempa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek menyusun jalur evakuasi di Pantai Prigi, Trenggalek, Minggu (28/8).

Dari peta BNPB diketahui, sebanyak 17 desa di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Watulimo, Muncang dan Panggul, Kabupaten Trenggalek masuk dalam zona rawan tsunami. Wilayah rawan tsunami itu dihuni oleh ribuan warga.

Saat menyusun jalur evakuasi, seluruh petugas kebencanaan mulai dari tim SAR hingga tenaga kesehatan, menggelar apel siaga bersama di pinggir Pantai Prigi. Pihak peserta bersama masyarakat juga menyusuri jalur evakuasi tsunami mulai dari bibir Pantai Prigi hingga ke titik aman atau selter yang ada di lereng perbukitan.

"Aksi susuri jalur evakuasi, sekaligus untuk mengukur estimasi waktu evakuasi ke

titik aman. Kali ini kita mengajak semua stakeholder, baik petugas maupun masyarakat dengan harapan mereka memiliki kewaspadaan sekaligus hafal terhadap terhadap jalur evakuasi," Kata Moch Nur Arifin, Bupati Trenggalek.

Kepala BPBD Trenggalek, Triadi Atmono mengatakan, pesisir selatan Trenggalek memiliki sejumlah jalur evakuasi titik aman tsunami, dan seluruh jalur telah dilengkapi dengan rambu petunjuk arah.

"Jadi dengan adanya kegiatan susur ini, masyarakat mengetahui waktu tempuh evakuasi dari bibir pantai ke titik aman, membutuhkan waktu sekitar 14 menit. Durasi tersebut masih layak untuk evakuasi tsunami," ujar Triadi Atmono.

BMKG memprediksi, ada potensi bencana gempa maksimal di selatan Jawa mencapai magnitudo (M) 8,7, yang bisa memicu gelombang tsunami dengan tinggi gelombang maksimal 28 meter. ● pra



MENGENALKAN BUSANA ADAT NUSANTARA

Peserta busana adat tradisional nusantara saat mengikuti kirab budaya Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia (Kreativesia) 2023 di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Minggu (27/8).

## Dindikbud Banten Belum Keluarkan Aturan Pembelajaran Jarak Jauh

**SERANG (IM)**- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Tabrani mengaku pihaknya belum mengeluarkan aturan terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi SMA/SMK/SK/ negeri di wilayah Tangerang Raya.

Sebelumnya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengeluarkan surat edaran (SE) terkait pengaturan work from home (WFH) dan work from office (WFO) bagi pegawai Pemprov Banten, terutama di wilayah aglomerasi terkait polusi udara di DKI Jakarta.

"Belum ada aturan dari Kemendikbud Ristek terkait itu," ujar Tabrani. Walaupun begitu, ia meminta para tenaga kependidikan dan peserta didik, khususnya di wilayah Tangerang Raya untuk tetap

menjaga kesehatan, seperti menggunakan masker saat berada di luar ruangan serta menjaga imunitas tubuh.

Ia mengaku apabila ada aturan baru dari Kemendikbud Ristek, maka pihaknya akan melakukan penyesuaian. "Kami juga masih menunggu aturan dari Kemendikbud Ristek," tutur mantan Kepala Dindikbud Kota Tangerang ini.

Sebelumnya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengeluarkan SE terkait pengaturan jadwal WFH dan WFO di lingkup Pemprov Banten. Dalam SE itu, tak semua OPD dapat menerapkan kebijakan WFH dan WFO. OPD yang melakukan pelayanan publik dicekualikan dalam kebijakan tersebut. Salah satu OPD-nya yakni Dindikbud. ● pra